

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca fenomena musim semi arab, rakyat Yaman menjadi salah satu yang sangat terdampak kerusuhan hingga berhasil menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh (BBC News, 2012). Selanjutnya pada masa kepresidenan Mansur Hadi, otoritas Pemerintah Yaman tidak bertahan lama akibat dari terjadinya pemberontakan bersenjata dari suku Houthi yang berasal dari wilayah utara Yaman (Lackner, 2017a). Ketidakstabilan keadaan sosial dan politik di wilayah Yaman kemudian menarik kerajaan Saudi yang juga didukung oleh kekuatan AS untuk melancarkan operasi militer guna mempertahankan rezim Mansur Hadi (AL Jazeera, 2015). Pada masa kepresidenan Barack Obama dan Donald Trump, Pemerintah AS berkomitmen menyelesaikan konflik Yaman melalui dukungan terhadap operasi militer Saudi dan sekutunya melalui kebijakan luar negerinya (Bachman, 2018).

Sejak tahun 2021, Pemerintah AS memiliki pendekatan yang lebih lunak terhadap Yaman daripada pemimpin Amerika Serikat sebelumnya. Pemerintah Joe Biden menanggukkan status Foreign Terrorist Group (FTO) terhadap Houthi yang merupakan warisan kebijakan dari Presiden Donald J Trump guna mengurangi intensitas konflik di Yaman (Hudson & Ryan, 2021). pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, kebijakan luar negeri AS lebih berfokus dalam menghadapi fenomena krisis kemanusiaan berkepanjangan yang melanda rakyat Yaman

(Macias, 2021). Pemerintah AS memiliki beberapa kebijakan terhadap Yaman yang diantaranya adalah inisiasi penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dukungan dewan keamanan PBB dan Pemerintah Oman sebagai mediator (Usher, 2023). Terdapat juga penambahan jumlah anggaran program bantuan kemanusiaan hingga penghentian konsesi penjualan senjata dan berbagai jenis bantuan militer lainnya kepada sekutu mereka yang terlibat di dalam konflik Yaman serta memperburuk krisis kemanusiaan (Aftandilian, 2020).

Pada 11 Januari tahun 2024, Pemerintah AS meluncurkan sebuah operasi militer dengan sandi “Poseidon Archer” terhadap Yaman yang merupakan sebagai bentuk respon dari serangkaian aksi teror yang terjadi di sepanjang selat Bab-el-Mandeb (Bertrand & Liebermann, 2024). Selat Bab-el-Mandeb merupakan sebuah jalur sempit yang berada di antara wilayah Yaman dan Eritrea. Milisi Houthi menjadi aktor non-negara yang terlibat serangkaian aksi teror dan sabotase terhadap kapal-kapal yang berupaya melintas di selat tersebut guna menuju terusan Suez di Mesir. Aksi sabotase dan serangan terhadap kapal dagang ini kemudian diidentifikasi oleh banyak negara sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan ekonomi global (Kusovac, 2023). Langkah ofensif tersebut adalah bentuk dari sebuah perubahan kebijakan AS yang cukup fundamental dibandingkan pada tahun-tahun awal masa pemerintahan Presiden Joe Biden yang dinilai lebih lunak terhadap Yaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor domestik dan internasional yang turut mempengaruhi terjadinya pergeseran paradigma kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Maka, penelitian ini memiliki rentang waktu dari sejak dilantik nya Presiden Joe Biden yaitu tahun 2021 hingga pada tahun terjadinya sebuah reorientasi kebijakan AS terhadap Yaman pada tahun 2024. Penelitian ini berupaya membedah pergeseran kebijakan AS terhadap Yaman yang terjadi pada masa suatu pemerintahan yang sama.

Penelitian yang dapat memberikan deskripsi tentang kebijakan pemerintahan Joe Biden terhadap Yaman di masa awal pemerintahannya adalah journal penelitian Usman Arshad dengan judul *“President Joe Biden’s Policy Shift: A Transformative Impact on Resolving the Yemen Conflict”*. Pada penelitian ini, Usman menggambarkan perubahan orientasi kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Joe Biden yang sangat signifikan terhadap Yaman dibanding pendahulunya yaitu Presiden Donald J Trump dan Barack Obama. Kebijakan Presiden Joe Biden lebih mengutamakan diplomasi dalam penyelesaian konflik dengan turut mempertimbangkan masalah-masalah krisis kemanusiaan di Yaman (Usman, 2023). Penelitian ini memberikan penjelasan terkait kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Joe Biden terhadap Yaman di tahun-tahun awal masa jabatannya.

Kemudian terdapat juga penelitian Patricija Glavica dan Leon Brulc dengan judul *“The Legality of The Defensive Measure Taken by The USA and The UK in Response to the Houthi Attacks”*. Jurnal ini membahas legalitas (Legal Standing) dari adanya operasi militer oleh Pemerintah Amerika Serikat di Yaman. Menurut Glavica & Brulc (2024), keterlambatan penanganan konflik di Gaza oleh institusi internasional telah mendorong milisi Houthi bertindak agresif dengan menyerbu

kapal-kapal yang mencoba melintasi jalur perdagangan di selat El Mandeb dan memunculkan dilema keamanan bagi banyak negara. Penelitian ini berkontribusi memberikan pandangan kepada penulis terkait landasan dari adanya aksi militer AS dari segi legalitas dan pendekatan keamanan.

Berdasarkan kepada penelitian sebelumnya, maka penulis dapat mengangkat jeda penelitian dengan fokus pada pergeseran kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman pada tahun 2021-2024. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kebijakan luar negeri. Penelitian ini mencoba mengekstraksi runtutan faktor-faktor eksternal (internasional) dan internal (domestik) yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma kebijakan luar negeri dari pemerintahan AS pada tahun 2021-2024 terhadap Yaman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah kami jelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **mengapa terjadi pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Joe Biden terhadap Yaman tahun 2021-2024?**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik program sarjana hubungan internasional di Universitas Pembangunan Nasional “UPN” Jawa timur. Diantara salah satu tujuan penulisan karya tulis ini adalah bagaimana

mengukur kemampuan mahasiswa untuk melimpahkan pengetahuannya sebagai hasil program studinya menjadi sebuah karya tulis yang ilmiah.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah guna mengkaji landasan dasar yang argumentatif dan menjadi bagian daripada bergesernya kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden terhadap Yaman. Pergeseran kebijakan luar negeri ini berujung hingga pada munculnya kebijakan militeristik yaitu operasi militer “Poseidon Archer” di Yaman. Selain dari pada itu, tujuan penelitian ini memberikan kajian terkini terkait kebijakan luar negeri Amerika terhadap Yaman pada kuartal akhir pemerintahan Joe Biden yaitu pada tahun 2024. Operasi “Poseidon archer” adalah bentuk intervensi militer perdana Amerika Serikat menghadapi langsung milisi Houthi di Yaman. Sehingga penelitian ini dapat menjadi topik utama tentang kebijakan Amerika Serikat di kawasan.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Teori Perubahan Kebijakan (*Foreign Policy Changes*)

Teori perubahan kebijakan ini diperkenalkan oleh Fredrik Doeser & Joakim Eidenfalk. Setiap negara memainkan peran politiknya di tataran global melalui kebijakan luar negerinya dengan harapan dapat menopang urusan kepentingan nasional. Perubahan kebijakan luar negeri sering ditemukan terjadi terhadap suatu negara sebagai bentuk respon pada setiap fenomena perubahan yang terjadi di tataran domestik dan global (Cason & Power, 2009). Pergeseran kekuatan dari unsur-unsur politik domestik juga berperan di dalam memunculkan suatu fenomena

perubahan kebijakan luar negeri. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran rezim hingga perubahan orientasi dukungan Partai politik terhadap sebuah kebijakan Pemerintah eksekutif (Cortell & Peterson, 1999). Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Changes*) adalah sebuah keputusan yang diambil oleh suatu negara untuk mengubah haluan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan sebelumnya menuju kebijakan yang baru dengan penuh pertimbangan untuk menghadapi suatu fenomena perubahan yang terjadi baik pada tataran global maupun regional.

Di dalam sebuah perubahan kebijakan luar negeri terdapat 2 faktor yang utama, diantaranya adalah faktor individu sebagai pemeran utama dalam pembuat kebijakan seperti Presiden, perdana menteri hingga raja, dan kemudian terdapat faktor kesempatan (*Windows Opportunity*). Windows Opportunity adalah rangkaian fenomena dan elemen yang muncul pada tataran domestik maupun internasional sehingga menjadi peluang terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri (Doeser & Eidenfalk, 2013). Fenomena Windows Opportunity terkadang sering diasumsikan berbeda oleh setiap aktor utama dari pembuat kebijakan. Maka, perlu menitikberatkan pada analisis persepsi aktor utama sebagai pembuat kebijakan terhadap fenomena Windows Opportunity dari pada mencari penjelasan objektif dari faktor pada fenomena-fenomena itu sendiri (Doeser & Eidenfalk, 2013).

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kebijakan luar negeri sebuah negara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini sangat berperan penting dalam muncul sebuah kebijakan luar negeri. Maka, perlu memahami dan menganalisis dengan baik faktor-faktor tersebut guna

mengidentifikasi sumber dari windows opportunity sebagai sebuah jalan dari terwujudnya perubahan arah kebijakan.

Faktor internal atau domestik yang terdiri dari birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, hingga Partai politik. Joakim Eidenfalk dalam konstruksi teorinya mengutip pemikiran Robert D. Putnam terutama menyangkut masalah integrasi faktor domestik dan internasional yang saling mempengaruhi dengan istilah “Two-Level Game”. Argumen utamanya adalah setiap pemimpin atau pembuat kebijakan harus mencapai kesepakatan dengan berbagai hambatan dan masalah pada tataran level domestik dan begitu juga pada tataran level internasional. Faktor politik domestik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap studi kebijakan luar negeri sebuah negara. Oleh karena itu, analisis yang bersifat komprehensif terhadap faktor domestik menjadi bagian penting dari analisis kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Tendensi munculnya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya selalu didahului dengan adanya terjadi transisi pergantian kekuasaan rezim dalam politik domestik, namun di dalam beberapa kasus, pergantian kebijakan luar negeri justru dilakukan oleh rezim yang sama setelah melalui serangkaian fenomena yang mengharuskan adanya reorientasi kebijakan (Hermann, 1980).

Birokrasi merupakan bagian dari sistem pemerintahan modern yang umumnya terdiri dari beberapa departemen, agensi, dan komisi yang turut menjalankan pemerintahan eksekutif. Setiap departemen, agensi, dan komisi ini kemudian menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. menurut Halperin et al. (2007), sistem

birokrasi pada umumnya bersifat lamban. Mayoritas birokrasi mempertahankan status quo di dalam pemerintahan. Sewaktu-waktu hanya sekelompok kecil yang mengadvokasikan sebuah orientasi kebijakan. Birokrasi juga memiliki sumber daya yang terbatas sehingga memiliki penuh pertimbangan untuk mendorong sebuah keputusan. Di dalam penelitian terkait studi perumusan kebijakan, terdapat 8 studi kasus dan hanya 1 diantaranya yang menunjukkan bahwa birokrasi berperan penting memprakarsai orientasi dari sebuah perubahan arah kebijakan (Kontos & Holsti, 1974). Kemudian terdapat faktor publik atau persepsi publik. Faktor dukungan publik dinilai cukup penting di dalam sebuah perubahan sebuah kebijakan. Tantangan bagi sebuah kebijakan adalah statusnya yang populer atau tidak bila ditinjau berdasarkan persepsi publik. Kebijakan yang tidak populer akan menuai dukungan yang minim hingga partisipasi publik yang rendah. Bahkan sebuah kebijakan Pemerintah juga dapat menemui sikap penentangan dari masyarakat berupa aksi demonstrasi (Doeser & Eidenfalk, 2013). Selanjutnya adalah media, media adalah penyedia layanan informasi publik yang berperan sekaligus menjadi penghubung antara publik dan Pemerintah. Beberapa media akan bertindak menjadi oposisi bagi sebuah kebijakan dan ada juga yang didesain untuk mendukung dan mempromosikan kebijakan Pemerintah. Media memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi dan mengubah opini dan persepsi publik terkait suatu fenomena tanpa disadari (McLuhan, 1994). Media memiliki beberapa agenda dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik dan mengubah kebijakan luar negeri (Doeser & Eidenfalk, 2013). Kemudian kelompok kepentingan, kelompok kepentingan di sini adalah kelompok yang dibentuk dan berhimpun dengan tujuan sosial maupun

politik tertentu. Pengaruh kelompok kepentingan meningkat bersamaan dengan kemampuan mereka untuk mengangkat isu-isu yang ada dan mempengaruhi kuantitas dukungan publik. Kapabilitas ini membuat suatu kelompok kepentingan menjadi unsur yang dapat mempengaruhi sebuah perubahan kebijakan luar negeri (Warhurst, 2004). Faktor domestik yang terakhir adalah Partai politik, Partai politik adalah sekelompok orang yang berperan membuat sebuah langkah keputusan dan juga membagi kekuasaan serta mendistribusikan demi kepentingan sosial yang bersifat inklusif. Partai politik pada umumnya ditemui di dalam parlemen akan memberikan tekanan dan dukungan terhadap Pemerintah eksekutif terkait kebijakan yang disahkannya. Partai politik menjadi unsur utama di dalam pemerintahan demokrasi yang berperan sebagai penopang aspirasi dan bentuk keterlibatan warga negara pada pemerintahan. Pengaruh Partai politik di dalam perubahan kebijakan luar negeri sangat dimungkinkan terjadi, Hal tersebut dikarenakan oleh Partai politik sebagai representasi masyarakat juga dapat memberikan tekanan elektoral melalui opini publik yang bernada kritis (Gustavsson, 1998).

Pada faktor eksternal terdiri dari tataran internasional yaitu faktor global, faktor kawasan atau regional, hubungan bilateral, hingga adanya peran aktor non-negara. Di dalam konteks global sendiri, keputusan kebijakan luar negeri pada umumnya dipengaruhi oleh fenomena politik global yang diinisiasi oleh musuh maupun aliansi, kebijakan luar negeri diputuskan untuk menjawab tantangan dari berbagai fenomena tersebut (Mintz & DeRouen Jr, 2010). Pengaruh dari sebuah kejadian, pergeseran keseimbangan kekuatan politik pada level internasional,

pergeseran norma atau pandangan internasional atau perubahan pada institusi internasional, semua itu dapat diklasifikasikan sebagai faktor global atau faktor internasional yang akan mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan kebijakan luar negeri (Doeser & Eidenfalk, 2013). Kemudian faktor regional, sebuah fenomena sosial atau politik yang terjadi di kawasan tertentu yang secara spesifik dapat mempengaruhi keseimbangan stabilitas dan keamanan di kawasan. Fenomena regional ini juga dapat menjadi sebab dari perubahan kebijakan luar negeri dari sebuah negara (Eidenfalk, 2006). Kemudian menurut Eidenfalk (2006), di dalam analisis regional atau kawasan, faktor keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*) di kawasan bagi setiap negara menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam studi pergeseran kebijakan luar negeri. Selanjutnya adalah faktor bilateral yang juga dapat menjadi sumber terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Aktor bilateral ini adalah negara maupun institusi internasional yang terdiri dari berbagai negara-negara dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui orientasi hubungan dagang hingga aliansi militer (Eidenfalk, 2006). Kemudian faktor yang terakhir adalah aktor non-negara. Aktor non-negara menjadi perhatian penting setelahnya munculnya aktor-aktor transnasional yang memiliki kekuatan dan pengaruh jaringan yang cukup kuat untuk mempengaruhi stabilitas di kawasan dan global. Aktor non-negara ini bisa berbentuk organisasi atau persatuan dan pergerakan tertentu yang dapat memainkan peranan yang krusial di kawasan maupun lintas global. Potensi yang dimiliki oleh aktor non-negara ini yang tercermin melalui gerakan serta peranan mereka telah menjadi bahan pertimbangan

bagi terjadinya sebuah perubahan kebijakan luar negeri oleh aktor utama yaitu negara (Eidenfalk, 2006)

1.5. Sintesis Pemikiran



Pada percaturan politik internasional, negara menjadi aktor utama yang secara alamiah memainkan peran penting di dalamnya. Kemampuan dan kekuatan dari sebuah negara memungkinkan untuk mengikat aktor lain demi menjaga kepentingan luar negerinya (Neack et al., 1995). Maka, perubahan kebijakan luar negeri merupakan suatu fenomena yang umum terjadi pada tataran politik global guna memenuhi kepentingan nasionalnya. penelitian ini akan menggunakan kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri yang berdasar kepada 2 analisis faktorial, yaitu analisis faktor domestik atau internal yang terdiri dari birokrasi, opini publik, media massa, Partai politik, kelompok kepentingan, Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari faktor global, faktor regional, hubungan bilateral dan aktor non-negara. Kedua faktor tersebut nantinya akan membuka peluang (*Windows Opportunity*) bagi terwujudnya sebuah perubahan kebijakan luar negeri dari

Pemerintah Amerika Serikat. Skripsi ini difokuskan kepada analisis pergeseran kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman sepanjang 2021-2024.

1.6. Argumen Utama

Perubahan kebijakan AS terhadap Yaman yang didorong pada tataran domestik yang diantaranya terdapat dukungan dari birokrasi AS terutama dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan terkait dilema keamanan, hingga dukungan publik akibat dari kekhawatiran mereka terhadap ekonomi global yang dapat terganggu oleh aksi pembajakan. Media masa seperti Washington dan CNN yang juga ikut mewartakan terkait dilema keamanan di Laut Merah turut mempengaruhi perubahan arah kebijakan. Kemudian terdapat dukungan politik dari senat Partai Republik di kongres AS guna mendorong adanya sebuah aksi dari Pemerintah eksekutif untuk mengamankan kepentingan strategis AS di kawasan Timur Tengah. Urgensi dari menjaga kepentingan strategis di jalur vital perdagangan global yang terletak di sepanjang Laut Merah telah mendapat dukungan dari kelompok kepentingan di dalam negeri seperti perusahaan Maersk Line yang menjalankan aktifitas ekspor dan impor (*Shipping*) antar negara. Pergeseran kebijakan Pemerintah Joe Biden dengan komitmen membawa kembali kekuatan militer melalui operasi ‘Poseidon Archer’ di Yaman adalah bentuk dari pengaruh dan kompleksitas eksternal seperti pengaruh global. Realitas fenomena global yang muncul terkait dilema keamanan yang datang seiring dengan aksi teror yang dilakukan oleh milisi Houthi di sepanjang selat Bab-el-Mandeb hingga mengancam keberlangsungan ekonomi global. Pengaruh regional yang kemudian menjadi pertimbangan AS adalah terkait keseimbangan kekuatan di kawasan.

Pemerintah AS melalui kebijakan luar negerinya berupaya menjaga mitra strategis mereka di kawasan Timur Tengah seperti Israel dari serangan milisi Houthi yang didukung oleh Republik Islam Iran. Terdapat juga hubungan bilateral antara Pemerintah AS dan Yaman yang kian memburuk menyusul melemahnya otoritas Pemerintah sah yang berakhir pada dominasi kekuatan milisi Houthi atas wilayah Yaman. Milisi Houthi sebagai aktor non-negara yang mendominasi wilayah Yaman, sering melakukan aktifitas sabotase dan teror di sekitar selat Bab-el-Mandeb dan telah mendorong perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman. Adapun faktor peluang (*Windows opportunity*) dari perubahan kebijakan AS adalah pada saat Presiden Joe Biden melihat adanya komitmen dari perdana menteri Inggris yaitu Rishi Sunak untuk mengadakan operasi militer bersama antara kerajaan Inggris dan Pemerintah AS guna mengamankan jalur vital ekonomi global yang berlokasi di selat el Mandeb dari berbagai aksi sabotase dan pembajakan. Perhatian bersama terhadap dilema keamanan terkait keberlangsungan ekonomi global juga mendorong dukungan dari beberapa negara aliansi AS seperti Bahrain, Denmark, Kanada, Selandia Baru, Belanda, dan Australia terhadap kebijakan operasi militer AS demi terwujudnya keamanan di selat Bab-el-Mandeb dari ancaman milisi Houthi.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan panduan eksplanatif kualitatif. Menurut Merriam & Tisdell (2016), hal yang paling fundamental dari penelitian kualitatif yaitu menggunakan informasi atau kalimat (*Word*) sebagai data dan acuan yang

diambil dan dianalisis dari berbagai sumber-sumber yang ada. Misalnya majalah, koresponden-koresponden dari media atau data-data dari penelitian yang telah tersedia sebelumnya. Seluruh data tersebut akan menjadi faktor utama sebagai pendukung landasan penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertindak menganalisis makna dibalik sebuah fenomena-fenomena sosial yang ada (interpretasi). Tujuan dari analisis dan interpretasi fenomena tersebut adalah guna menemukan sebuah konjungsi atau hubungan dari aspek penelitian yang akan dikaji. Kemudian melalui rangkaian data dan fakta yang ditemukan melalui proses kajian ilmiah tersebut nantinya akan dihasilkan penjelasan untuk memenuhi unsur eksplanatif pada penelitian. Prosedur dari penelitian ini digunakan untuk menganalisis studi kasus terkait fenomena dari pergeseran kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman sepanjang 2021-2024.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Pemerintah Amerika Serikat yang dalam hal ini di bawah Presiden Joe Biden terhadap Yaman yang hingga munculnya kebijakan dengan instrumen militer berupa operasi militer dengan sandi “Poseidon Archer”. Penelitian ini dimulai dengan pemerintahan Presiden Joe Biden yang sejak awal masa kekuasaannya memiliki pendekatan yang lebih lunak di Yaman dengan mengupayakan perdamaian dan stabilitas hingga bantuan ekonomi terhadap Yaman. Pendekatan terhadap Yaman kemudian mengalami perubahan yang ditandai dengan diberlakukannya kembali kekuatan militer terhadap Yaman di tahun akhir masa jabatannya. Maka dengan rentang waktu kekuasaan dari 2021-2025, telah tercatat

terjadi perubahan kebijakan luar negeri Pemerintah Joe Biden yang cukup signifikan terhadap Yaman. Rentang tahun tersebut menjadi jangkauan waktu dari penelitian yang akan diangkat di dalam skripsi ini.

1.7.3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah penggunaan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah kumpulan data yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian atau data yang tersedia dari lembaga-lembaga yang telah menjadi sumber bagi penelitian sebelumnya (Patil, 2021). Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan banyak mengambil data dari buku dan penelitian sebelumnya, sumber digital terpercaya, hasil konferensi pers Pemerintah, situs resmi publikasi Pemerintah hingga media atau produk jurnalistik sebagai bahan referensi penyusunan penelitian. Penulis menggunakan sumber-sumber yang berangkat dari pihak ke tiga dan terklarifikasi sebagai sumber yang orisinal seperti majalah AS seperti Washington Post dan CNN. Penulis juga akan mengelola data yang juga bersumber dari pernyataan resmi dari Pemerintah seperti kongres, Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut B. Miles et al. (2014), dalam menganalisis data kualitatif tentu memerlukan reduksi data atau spesifikasi data. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengelompokan data, kategorisasi, hingga penyusunan kembali data tersebut menjadi sebuah kalimat yang dapat mempresentasikan gambaran utuh objek yang

akan diteliti. Kemudian data yang disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan konjungsi antara data secara sistematis hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah penulis akan membedah hingga menganalisis sekumpulan data-data terkait kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman dengan tujuan menemukan sebuah penjelasan yang mengemukakan konjungsi dari dinamika sosial dan politik yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Yaman. Data-data kredibel yang telah terhubung tadi dengan penjelasan terkait objek penelitian kemudian dipaparkan sebagai hasil penelitian baik dalam bentuk paragraf, gambar, maupun tabel.

1.7.5. Sistematika Penulisan

BAB 1, terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, landasan konseptual, sintesis dari penelitian, argumen utama penelitian, metodologi penelitian, tipe dari penelitian, jangkauan penelitian, teknik dari pengumpulan data, teknik analisis hingga pada sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan dan menganalisis terkait faktor Internal (Domestik) dan faktor eksternal (Internasional) dari pergeseran kebijakan luar negeri pemerintahan AS terhadap Yaman pada tahun 2021-2024

BAB III, menjelaskan dan menganalisis peluang dari perubahan kebijakan (*Windows Opportunity*) pada pergeseran paradigma kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika Serikat terhadap Yaman hingga munculnya kebijakan operasi militer “Poseidon Archer”.

BAB IV, kesimpulan dan saran